

PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN WISATA BUKIT KLANGON YOGYAKARTA

Aprillianty Belinda Ayu Nadifa Putri¹⁾, Kuncoro Bayu Prasetyo²⁾

¹⁻² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang
E-mail: aprilbelinda13@students.unnes.ac.id; mrbayu@mail.unnes.ac.id

Artikel histori:

Submit: 09-07-2025

Revisi: 28-11-2025

Diterima: 10-12-2025

Terbit: 20-12-2025

Kata Kunci:

partisipasi masyarakat
lokal,
community based
tourism,
pengelolaan wisata

Korespondensi:

aprilbelinda13@students.
unnes.ac.id

Abstract: *Community-based tourism management has become an interesting topic in efforts to improve community welfare by developing tourist attractions in each region. One example of community-based tourism management can be seen in the management of Klangon Hill Tourism. Klangon Hill Tourism is present in community development efforts after the Mount Merapi disaster. This tourism development comes from within the community and for the community. The purpose of this study is to analyze the forms of community participation and obstacles in the management of Klangon Hill Tourism in an effort to improve the welfare of the local community. This study used a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show community participation in tourism management starting from participation in management and implementation, development of ideas, utilization of results, evaluation and monitoring. The community is considered to participate actively and passively in tourism development, thus having an impact on improving welfare. Development and consistency are needed from various stakeholders for tourism management to continue.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman destinasi wisata di dalamnya. Keberagaman tersebut dapat ditemukan salah satunya berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang menjadi salah satu daerah rujukan pariwisata bagi para wisatawan local maupun wisatawan mancanegara. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat bahwa pada bulan Desember 2024 terdapat 7.167 kunjungan wisatawan mancanegara sedangkan kunjungan wisatawan nusantara tercatat pada bulan Januari-Desember 2024 sebanyak 38.030.739 perjalanan ke provinsi tersebut. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi seluruh sektor di kalangan masyarakat maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal.

Wisata didefinisikan sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok individu dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan untuk rekreasi ataupun tujuan tertentu dengan jangka waktu sementara. Pariwisata sendiri dimaknai sebagai berbagai kegiatan wisata dengan dukungan berbagai fasilitas serta layanan yang telah disediakan oleh pelaku wisata. Wisata maupun pariwisata saling berkaitan dengan kepariwisataan yang melibatkan multidisiplin serta multidisiplin sebagai lintas kepentingan seperti masyarakat, pemerintah setempat, wisatawan maupun pelaku wisata (Ridwan & Aini, 2020: 5-6)

Kepariwisataan erat kaitannya dengan daya tarik dari suatu tempat tidak terkecuali dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi ini memiliki daya tarik yang beragam mulai dari wisata alam, museum, taman hiburan, kesenian dan kebudayaan. Kabupaten serta kota madya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki daya tarik masing-masing salah satunya berada di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kunjungan wisatawan tertinggi yaitu 36,55% dari total wisatawan yang berkunjung di Provinsi Daerah Yogyakarta (BPS DIY, 2024).

Tabel 1
Jumlah Wisatawan Nusantara Januari-Desember 2024

No.	Kabupaten/Kota	Total Pengunjung	Presentase
1.	Kabupaten Sleman	13.899.888	36,55%
2.	Kota Yogyakarta	10.092.174	26,54%
3.	Bantul	6.617.696	17,40%
4.	Gunung Kidul	5.191.194	13,65%
5.	Kulon Progo	2.229.787	5.86%
Total		38.030.739	100%

(Sumber: BPS DIY, 2024)

Kabupaten Sleman memiliki potensi wisata yang cukup beragam pada masing-masing wilayahnya. Luas wilayah kabupaten tersebut merupakan 18 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Hadi & Yulianto, 2021). Hal tersebut dimanfaatkan dengan banyaknya tempat wisata yang tersedia seperti agrowisata bumi, museum, seni dan budaya, maupun taman hiburan. Berbagai wisata tersebut dikelola oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pelaku wisata, maupun masyarakat setempat. Pengelolaan wisata ini ditujukan dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan yang didasarkan oleh Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Sleman yang dibagi atas dua tahapan dengan fokus pengembangan pada empat pilar yaitu destinasi, industri, kelembagaan dan pemasaran (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2015).

Keberhasilan dalam pengelolaan wisata tentunya perlu adanya dukungan dari beberapa pihak tidak terkecuali dengan masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat mengelola potensi yang ada serta dapat memanfaatkannya sebagai alternatif mata pencaharian seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Kalurahan Glagaharjo. Daya tarik wisata yang ada di desa tersebut adalah Wisata Alam Bukit Klangon yang merupakan salah satu destinasi wisata alam dengan pemandangan berlatarkan Gunung Merapi. Berbagai kegiatan wisata alam dapat dilakukan seperti *camping*, *downhill*, *tracking* maupun hanya sekedar berekreasi. Wisata ini dikelola langsung oleh masyarakat di kalurahan tersebut serta bekerja sama dengan Pemerintah kalurahan setempat. Aktivitas pengelolaan tersebut pertama kali digerakkan oleh pemuda desa setempat hingga pada akhirnya pandemi Covid-19 menyebabkan

aktivitas wisata terhenti. Pemerintah Kalurahan Glagaharjo berusaha untuk menghidupkan kembali dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata atau biasa disebut dengan Pokdarwis akan tetapi belum terlihat dampak yang begitu signifikan. Menyikapi hal tersebut pengelola Wisata Bukit Klangon yang mayoritas merupakan masyarakat Dukuh Kalitengah Lor mengambil alih pengelolaan Wisata tersebut.

Berbagai kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata telah banyak dilakukan. Fitriani dkk (2017) dalam penelitiannya melihat partisipasi masyarakat Nagari Sungai Pinang dalam upaya pembangunan ekowisata berupa Sungai Pinang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekowisata tersebut dipelopori oleh kaum muda. Pembangunan wisata tersebut juga dilakukan secara mandiri oleh masyarakat sekitar dengan serangkaian kegiatan pengelolaan wisata. Cáceres-Feria dkk (2021) dalam penelitiannya melihat pengaruh keterlibatan masyarakat Linares de La Sierra dalam ketahanan komunitas yang terjadi setelah adanya depopulasi. Pariwisata berbasis masyarakat dinilai berdampak dalam berbagai aspek seperti ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. keterlibatan masyarakat dinilai mampu menumbuhkan rasa kepemilikan serta identitas secara kolektif. Pariwisata berbasis masyarakat dinilai mampu memperkuat hubungan sosial di dalamnya.

Tilar & Alwin (2022) dalam penelitiannya melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Kawung Tilu yang berada di Bojong Rangkas Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan ide serta tenaga dalam upaya pengelolaan wisata Kawung Tilu. Rocca & Zielinski (2022) dalam penelitiannya di Kolombia melihat bagaimana pariwisata berbasis masyarakat ini mampu mengurangi tingkat kemiskinan serta ketidaksetaraan sosial yang terjadi di desa tersebut pasca adanya konflik politik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya modal sosial yang kuat untuk mencapai keberhasilan tujuan tersebut. terdapat peningkatan ekonomi yang dirasakan dengan adanya program ini akan tetapi masih tergolong rendah.

Syarifuddin (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesadaran serta kemauan masyarakat untuk mengembangkan Desa Wisata tersebut. Penelitian tersebut meyakini bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan masyarakat kesempatan dalam mengakses informasi, kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan serta pengembangan, peluang dalam ekonomi, memperoleh pendidikan yang relevan serta adanya pembangunan berkelanjutan.

Ruiz & Gozalez (2024) dalam penelitiannya secara garis besar membahas mengenai pariwisata pedesaan atau pariwisata berbasis komunitas yang dipimpin oleh kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan terkait dengan partisipasi pengembangan pariwisata di Banalauria, Spanyol. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa masyarakat lokal memiliki otoritas untuk mengurangi penawaran pariwisata yang didasarkan atas kondisi individu tersebut. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pentingnya lembaga lokal dalam mengakomodir potensi wisata di daerah pedesaan. Shrestha dkk (2025) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa pemberdayaan budaya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam praktik pariwisata adat dalam masyarakat Khokana Newar. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pariwisata dapat memperkuat identitas individu serta kolektif yang menjadi proses budaya.

Kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata tersebut telah dilakukan tetapi kajian secara eksplisit belum terlalu banyak untuk dikaji dalam aspek sosiologis. Kajian ini mengulas bagaimana potensi daerah pasca bencana alam dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak. Kajian ini berfokus pada partisipasi masyarakat secara kolektif dalam pengembangan wisata. Kajian ini juga melihat bagaimana interaksi masyarakat serta kerja sama dalam pengelolaan wisata berperan penting dalam keberhasilan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, adapun pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan Wisata Bukit Klangon. Kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaan wisata oleh masyarakat lokal bagi kesejahteraan bersama?

Community Based Tourism (CBT) juga digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Wisata Bukit Klangon. Penggunaan teori ini bertujuan untuk mengurai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Wisata Bukit Klangon. *Community Based Tourism (CBT)* merupakan salah satu konsep yang melihat bagaimana masyarakat mengelola, mengembangkan, serta memiliki daya tarik wisata di daerahnya. Cakupan dari implementasi pengembangan *Community Based Tourism (CBT)* adalah dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi budaya, dan dimensi politik (Syarifah & Rochani, 2021)

Berangkat dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengurai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Wisata Bukit Klangon dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, Teori yang digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat Dukuh Kalitengah Lor dalam pengelolaan Wisata Bukit Klangon adalah teori partisipasi sosial dari Cohen & Uphoff. Teori tersebut mengklasifikasikan bentuk partisipasi kedalam beberapa tahapan seperti partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, kebermanfaatan, proses evaluasi (Fauzia & Arieffiani, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif atau biasa juga disebut dengan metode penelitian naturalistik merupakan metode yang dilakukan dalam situasi yang bersifat alamiah atau *natural setting*. Cresswell (dalam Kusumastuti & Khoiron, 2019 : 2) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami makna oleh individu maupun kelompok yang berakar pada masalah sosial. Pendekatan ini digunakan untuk mengurai partisipasi masyarakat secara deskriptif.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kawasan wisata Bukit Klangon Desa Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah pengelolaan wisata di tempat tersebut dikelola langsung oleh masyarakat serta pemerintah desa. Lokasi penelitian tersebut menjadi penggerak ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pasca terdampak bencana Letusan Gunung Merapi pada tahun 2010.

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Mei hingga 30 Juni 2025. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan dasar utama yang dapat mempengaruhi kualitas data dari hasil penelitian (Sugiyono, 2013 :

137). Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pengelola Wisata Bukit Klangon yaitu Pak Karnu dan Pak Pono. Adapun masyarakat setempat di luar dari pengelola Wisata Bukit Klangon Pak Anton, Bu Arini, Pak Adi. Pemerintah Kalurahan dalam informan penelitian ini yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai keterkaitan Pemerintah Kalurahan terhadap pengelolaan wisata adalah Pak Joko. Adapun informan sebagai pelaku usaha yaitu Bu Jumirah dan Bu Novita. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara observasi secara langsung kondisi Wisata Bukit Klangon. Dokumentasi juga dilakukan dengan melihat catatan, arsip maupun laporan dari Pengelola Wisata Bukit Klangon serta data milik Kalurahan Glagaharjo.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Qomaruddin & Sa'diyah, 2024) yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi lalu diakhir dengan penarikan kesimpulan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengamati langsung Wisata Bukit Klangon, melakukan wawancara dengan berbagai informan yang terkait serta mengumpulkan data tertulis, foto, dokumen yang terkait melalui platform yang relevan. Data yang telah dikumpulkan dikategorikan lalu disederhanakan berdasarkan topik yang relevan. Setelah itu, peneliti menulis narasi dalam menyajikan data penelitian. Data tersebut kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber untuk menghasilkan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dukuh Kalitengah Lor

Dukuh Kalitengah Lor merupakan salah satu dukuh di Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini berada di area perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah Secara geografis, dukuh tersebut berbatasan langsung dengan berbagai wilayah. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan. Di sebelah Utara merupakan kawasan kehutanan yang langsung berdekatan dengan Gunung Merapi. Di sebelah timur bersebelahan dengan Desa Balerante, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Wukirsari dan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan. Dukuh Kalitengah Lor berada dalam ketinggian lebih kurang 600 sampai dengan 1150 m di atas permukaan laut. Dukuh Kalitengah Lor berada dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) III dengan jarak 4 kilometer dari puncak Gunung Merapi

Kondisi Demografi Dukuh Kalitengah Lor memiliki jumlah pendudukan 657 jiwa dengan 326 laki-laki serta 331 Perempuan. Dukuh Kalitengah Lor terdiri atas 3 Rukun Warga (RW) serta 4 Rukun Tetangga (RT). Mayoritas Penduduk di Dukuh tersebut bermata pencaharian sebagai Petani. Hasil pertanian di Kalurahan tersebut merupakan petani sayur seperti cabai, bawang dan sawi. Tidak hanya sebagai petani, banyak masyarakat juga mayoritas sebagai peternak. Adapun hewan ternak yang banyak ditemukan adalah sapi perah. Selain itu masyarakat juga aktif sebagai penambang pasir di Aliran Sungai Gendol. Adapun mata pencaharian lainnya Karyawan Swasta, Wiraswasta, Buruh Harian Lepas, Perangkat Desa dan lain sebagainya.

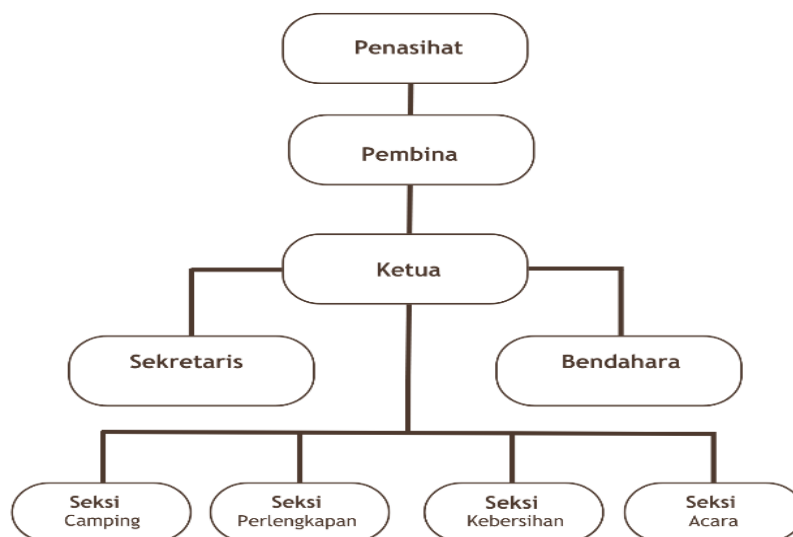
Kondisi Sosial-budaya dari masyarakat Dukuh Kalitengah Lor cenderung guyub dan rukun. Masyarakat Kalitengah Lor juga tergolong masih melestarikan budaya Jawa. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai tradisi yang masih dijalankan oleh

masyarakat sekitar seperti *kenduri* dan *mitoni* (tujuh bulanan). Selain itu masyarakat juga aktif dalam melestarikan kesenian tradisional seperti *Jathilan*. Mayoritas masyarakat Dukuh Kalitengah Lor beragama Islam dengan fasilitas berupa masjid serta mushola yang kerap digunakan. Pemerintah Kalurahan mendukung kegiatan masyarakat dengan diadakannya lembaga sosial di dukuh tersebut seperti kelompok tani dan koperasi peternakan sapi.

Deskripsi Umum Wisata Bukit Klangon

Wisata Bukit Klangon merupakan destinasi wisata yang dikelola secara langsung oleh masyarakat Dukuh Kalitengah Lor. Jumlah keseluruhan masyarakat yang terlibat dalam pengelola Wisata Bukit Klangon adalah 60 orang dengan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kepala Dukuh Kalitengah Lor pun turut terlibat langsung dengan bertanggung jawab dalam pengelolaan wisata. Secara administratif, kedudukan Kepala Dukuh tersebut sebagai Pembina Wisata Bukit Klangon. Adapun struktur kepengurusan Wisata Bukit Klangon adalah sebagai berikut

Bagan 1
Struktur Pengelola Wisata Bukit Klangon



(Sumber: Data Primer, 2025)

Akses menuju Bukit Klangon dapat ditempuh melalui pusat Kota Yogyakarta menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Dari pusat kota, perjalanan dimulai dengan mengambil arah utara menuju Jalan Kaliurang dengan melewati kawasan kaliurang lalu menuju perempatan Cangkringan. Setelah itu dapat mengikuti petunjuk arah menuju Kalurahan Glagaharjo hingga Dukuh Kalitengah Lor. Sepanjang jalan banyak ditemukan arah penunjuk menuju wisata Bukit Klangon. Jarak Wisata Bukit Klangon dengan Pusat Kota Yogyakarta sekitar 25-32 kilometer dengan waktu tempuh 45 menit hingga 1 jam tergantung dengan kondisi lalu lintas serta kendaraan. Namun, jika menggunakan transportasi umum tergolong susah untuk dijangkau.

Gambar 1
Wisata Bukit Klangon



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

Atraksi Wisata yang dapat dinikmati di area tersebut adalah pemandangan Gunung Merapi yang dapat dilihat secara langsung dengan cuaca yang memungkinkan. Selain itu, Bukit Klangon juga menyediakan aktivitas olahraga *Downhill* serta kegiatan berkemah. Pengunjung juga dapat melakukan kegiatan tracking dengan ditemani oleh pemandu Wisata Bukit Klangon.

Untuk menunjang kegiatan wisata di area tersebut, terdapat berbagai fasilitas yang cukup memadai. Pengelola menyediakan jalur lintasan *Downhill* yang sering digunakan dalam ajang perlombaan nasional. Selain itu pengelola juga menyediakan persewaan alat berkemah. Adapun fasilitas pendukung lainnya yaitu toilet, musholla, tempat parkir, serta balai pertemuan atau pendopo.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Bukit Klangon

Konteks konsep partisipasi sosial yang dikemukakan oleh Cohen & Uphoff, partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan dalam empat tahapan partisipasi yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam kebermanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi dan monitoring (Fauzia & Arieffiani, 2020). Konsep tersebut juga digunakan dalam menggambarkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan Wisata Bukit Klangon. Data hasil penelitian yang diperoleh dapat diklasifikasikan berdasarkan Teori Partisipasi Sosial oleh Cohen & Uphoff sebagai berikut:

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Ide dan Gagasan Pengembangan

Wisata Bukit Klangon merupakan salah satu wisata yang dikembangkan oleh Masyarakat Kalitengah Lor. Pada mulanya tempat ini merupakan tanah lapang serta kawasan hutan yang berada di dataran tinggi Dukuh Kalitengah Lor. Pemuda Dukuh Kalitengah Lor yang merupakan Karang Taruna di dukuh tersebut memiliki inisiatif untuk menjadikan tanah tersebut menjadi objek wisata. Kini pemuda tersebut turut andil dalam pengelolaan Wisata Bukit Klangon.

Menanggapi ide serta gagasan dari pemuda tersebut, Pemerintah kalurahan berusaha memfasilitasi dengan merealisasikan tanah tersebut menjadi sebuah Objek Wisata. Motif pemuda dan pemerintah kalurahan dalam pembangunan Wisata Bukit Klangon adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Para pemuda dan pemerintah kalurahan sepakat untuk memberi nama wisata tersebut dengan nama “Glagahsari” namun seiring dengan pengembangan

wisata mengalami perubahan nama menjadi “Wisata Bukit Klangon”. Hal tersebut sejalan dengan Wawancara yang dilakukan dengan Pak Pono selaku Ketua Pengelola Wisata Bukit Klangon pada 8 Mei 2025.

..“awal pembentukan Bukit Klangon sebenarnya dulu kan hutan ya, nah terus dari kami kelompok pemuda terus dari kami pemuda membentuk kelompok Pokdarwis. Terus dari kami mengajukan ke Pemerintah Desa. terus Pemerintah Desa mengalokasikan sendiri. Nama Klangon ini sebenarnya dari nama kampung, nama kampungnya ini dari Klangon. Cuma dari pemerintah desa dialihkan jadi Kalitengah Lor, Jadi Klangon sendiri saya pakai untuk nama wisata ini jadi Wisata Bukit Klangon..”

Pengelolaan Wisata Bukit Klangon terus dilakukan secara aktif oleh masyarakat yang diorganisir oleh Pengelola Wisata Bukit Klangon. Dalam proses pengelolaan wisata perlu adanya diskusi yang melibatkan seluruh masyarakat. Keterlibatan tersebut merupakan aspek penting dalam penguatan demokrasi dalam masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan (Nurhayati & Antoro, 2024). Dalam pengambilan keputusan untuk upaya pengembangan Wisata Bukit Klangon dilakukan secara kolektif melalui pertemuan rutin yang diadakan setiap bulan dalam upaya pengembangan wisata seperti pengajuan perbaikan infrastruktur kepada Pemerintah Kalurahan selaku fasilitator dalam pengelolaan Wisata Bukit Klangon. Namun upaya ini belum melibatkan masyarakat umum yang bukan bagian dari pengelola Wisata Bukit Klangon.

Partisipasi dalam Pelaksanaan Pengelolaan

Pembangunan penunjang kegiatan wisata Bukit Klangon seperti fasilitas serta infrastruktur wisata menggunakan dana dari pemerintah kalurahan serta swadaya masyarakat. Pemerintah Kalurahan berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan wisata, sedangkan masyarakat sebagai pelaksana di lapangan. Pemerintah Kalurahan memberikan kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan kepada masyarakat sesuai kemampuannya agar nantinya dapat secara optimal melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.

Pembagian tugas dan kerja dari masing-masing struktur disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Sistem kerja yang dilakukan dalam pengelolaan wisata tersebut menggunakan sistem piket. Sistem piket tersebut dibagi atas beberapa regu yang terdiri 7 regu yang beranggotakan 13 orang pada hari kerja. Sedangkan pada hari libur terdiri dari 8 regu yang beranggotakan 20 orang. Sistem bagi hasil yang didapat juga tergolong fleksibel. Siapa yang di hari tersebut mau bekerja maka dialah yang mendapat upah. Selama observasi berlangsung, tidak jarang pengelola tersebut hadir untuk memenuhi jadwal piket tersebut. Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Pak Pono selaku Pembina Pengelola Wisata Bukit Klangon pada 2 Mei 2025.

...”misal ada yang masuk untuk jadi pengelola kita terbuka untuk warga masyarakat karena sistemnya presentase. Kalau kerja ya dapat uang kalau engga ya engga. Untuk kriteria sementara tidak ada yang penting mau bekerja karena pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kita anggap punya kemampuan lebih maka kita plotkan misal di bidang apa nggeh, eumm.. Promosi...”

Seluruh kalangan masyarakat dapat bergabung dalam pengelolaan wisata Bukit Klangon, Tidak ada syarat maupun ketentuan khusus dalam keterlibatannya

langsung untuk mengelola wisata. Hanya saja bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan tidak diperkenankan untuk terlibat. Masyarakat juga terlibat langsung dalam pelaksanaan dalam pengembangan wisata. Dapat dikatakan bahwa masyarakat menjadi tokoh utama yang mengerti arah pengembangan wisata.

Tidak jarang program maupun kegiatan dilaksanakan di Wisata tersebut seperti perlombaan olahraga *downhill*. Banyak masyarakat umum memanfaatkan kegiatan ini dengan menyewakan rumah mereka sebagai tempat persinggahan pengunjung. Selain itu, masyarakat umum juga turut berpartisipasi sebagai penyedia makanan dalam skala yang besar untuk menunjang kegiatan yang diselenggarakan di Wisata Bukit Klangon

Partisipasi dalam Kebermanfaatan Hasil

Salah satu bentuk konkret kebermanfaatan ekonomi dari pengelolaan wisata Bukit Klangon adalah diterapkannya sistem bagi hasil retribusi yang adil dan terstruktur, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman. Dalam sistem tersebut, pendapatan dari retribusi wisata dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu 40% untuk Pemerintah Kabupaten, 36% untuk Pemerintah Desa Glagaharjo, dan 24% untuk pihak pengelola wisata. Skema ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat melalui lembaga pengelola dalam menjaga keberlanjutan dan transparansi tata kelola wisata.

Tidak hanya berhenti di tingkat pengelola, hasil retribusi yang diterima oleh pengelola juga turut didistribusikan ke masyarakat, khususnya melalui lembaga Rukun Tetangga (RT). Rukun Tetangga (RT) yang ada di Dukuh Kalitengah Lor mendapatkan alokasi dana sebesar 5%, sehingga setiap RT dapat memperoleh bagi hasil antara 250.000 hingga 300.000 per bulan, tergantung jumlah pendapatan Wisata Bukit Klangon. Hal tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat, pembangunan fasilitas lingkungan, serta penguatan peran warga dalam mendukung keberlanjutan wisata.

Partisipasi dalam Evaluasi dan Monitoring

Dalam upaya pengembangan dan perbaikan pengelolaan Wisata Bukit Klangon, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses evaluasi dan monitoring. Partisipasi ini diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan saran terkait operasional wisata, baik dari segi pelayanan, fasilitas, maupun tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan wisata yang mereka kelola sendiri secara partisipatif.

Proses evaluasi dan monitoring tersebut dilakukan secara rutin melalui pertemuan dan musyawarah bulanan yang telah menjadi agenda tetap dalam pengelolaan. Biasanya, kegiatan ini dilaksanakan setiap tanggal 5 pada setiap bulan, meskipun pelaksanaannya tetap bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi serta ketersediaan warga. Dalam musyawarah tersebut, seluruh elemen yang terlibat baik dari pengelola, perangkat desa, perwakilan RT, maupun pelaku usaha wisata lokal berkesempatan untuk memberikan laporan kegiatan, menyampaikan kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi dan rencana tindak lanjut secara bersama-sama.

Menariknya, pertemuan tersebut tidak hanya digunakan sebagai forum evaluasi dan monitoring, tetapi juga menjadi momen penting dalam pembagian hasil

keuntungan wisata. Pembagian hasil dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga memperkuat kepercayaan dan rasa keadilan di antara warga. Mekanisme ini mencerminkan praktik pengelolaan wisata yang demokratis, di mana setiap keputusan diambil melalui proses musyawarah mufakat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Teori partisipasi yang dikembangkan oleh Cohen dan Uphoff. Cohen & Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011: 61-63; Septiani & Ma'ruf, 2019) menjelaskan bahwa ide serta gagasan dari masyarakat merupakan bentuk dari partisipasi dalam menentukan arah perkembangan Wisata Bukit Klangon dengan melibatkan kepentingan secara kolektif. Cohen dan Uphoff (dalam Fitra dkk, 2023) menyebutkan bahwa partisipasi dapat dilihat dari dimensi prakarsa atau individu yang mendahului adanya partisipasi tersebut. Jelas disebutkan bahwa, tonggak utama adalah Pemuda.

Masyarakat juga dituntut untuk aktif dalam mengemukakan gagasan, turut hadir dalam musyawarah, aktif dalam diskusi tersebut serta memiliki hak penolakan atas program pengembangan wisata. Partisipasi dalam pelaksanaan juga terlihat dalam Pengelolaan Wisata Bukit Klangon dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan sistem kerja serta struktur yang jelas. Tidak hanya itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam tenaga serta materi dalam pengembangan wisata. Kedudukan masyarakat sebagai pelaksana di lapangan serta seluruh serangkaian kegiatan pengembangan wisata menjadi hal yang sangat relevan dalam teori Partisipasi ini.

Partisipasi kebermanfaatan hasil juga dapat dirasakan oleh seluruh pihak. Pengelola Wisata Bukit Klangon yang merupakan masyarakat dukuh tersebut beserta Pemerintah Kalurahan juga turut mengoptimalkan kebermanfaatan agar menyeluruh dirasakan oleh masyarakat. Dalam upaya tersebut perlu adanya evaluasi serta monitoring yang melibatkan seluruh pihak terkait. Partisipasi dalam proses evaluasi serta monitoring terlihat dengan jelas melalui musyawarah yang digelar oleh pengelola.

Penerapan Konsep *Community Based Tourism* juga dapat dilihat dalam pengembangan wisata Bukit Klangon. Pengelolaan wisata perlu adanya pengembangan yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, adanya media atau lembaga dalam pengelolaan wisata, kegiatan konservasi serta terciptanya kegiatan usaha oleh masyarakat dalam upaya mendukung wisata setempat (Fifiyanti dkk, 2023). Hal tersebut tergambar jelas dari partisipasi masyarakat dukuh Kalitengah Lor dalam pengembangan wisata. Akan tetapi, hasil observasi yang telah dilakukan, masyarakat umum yang bukan bagian dari pengelola terkadang minim untuk berkontribusi dalam pengembangan wisata dalam aspek pengambilan keputusan.

Dampak Wisata Bukit Klangon Terhadap Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Lokal

Keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan wisata memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Melalui keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian lokal melalui program pengembangan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat juga dapat memperkuat solidaritas antar masyarakat dalam tingkat lokal (Rifdah & Giriwati, 2024).

Peningkatan Ekonomi

Pengelolaan wisata Bukit Klangon melibatkan peran aktif masyarakat telah memberikan dampak yang nyata dalam aspek ekonomi. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya perekonomian masyarakat lokal. Warga memperoleh penghasilan tambahan melalui berbagai kegiatan wisata seperti penyewaan homestay, warung makan, jasa transportasi wisata (ojek), hingga penjualan hasil kerajinan dan oleh-oleh khas lokal. Aktivitas ekonomi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama.

Selain itu, pengelolaan wisata juga menciptakan variasi pekerjaan baru yang lebih beragam dan inklusif. Generasi muda yang sebelumnya cenderung merantau ke kota kini memiliki peluang kerja di kampung halamannya sendiri, baik sebagai pemandu wisata, pengelola fasilitas wisata, maupun pelaku usaha kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mampu menjadi alternatif lapangan kerja yang menjanjikan di kawasan pedesaan. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Pak Anton pada 16 Mei 2025.

..”Dahulu banyak yang hanya fokus pada tambang pasir saja mbak, sekarang adanya Wisata Bukit Klangon, masyarakat memiliki alternatif pekerjaan baru. Karena pasir kan tidak selamanya ada mbak..”

Peningkatan Infrastruktur Dukuh

Peningkatan infrastruktur menjadi salah satu dampak positif dari adanya pengelolaan Wisata Bukit Klangon yang dilakukan oleh Masyarakat lokal tersebut. Seiring dengan peningkatan fasilitas penunjang pariwisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, aksesibilitas yang memadai menjadi fokus pengembangan para pengelola. Dalam upaya tersebut pengelola berusaha menjalin komunikasi dan koordinasi dengan perangkat kalurahan untuk merealisasikan upaya tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Hasil Wawancara yang dilakukan kepada Pak Adi pada 30 Juni 2025.

”Untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan kami terus koordinasikan mbak dengan pihak kalurahan..”

Peningkatan infrastruktur tersebut dapat dilihat dari peningkatan pembangunan jalan yang memadai. Tidak hanya itu fasilitas penerangan di dukuh tersebut turut meningkat. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang kegiatan rekreasi yang dilakukan oleh pengunjung di Wisata Bukit Klangon yang dilaksanakan di malam hari seperti kegiatan *camping*. Tidak hanya penunjang yang merasakan dampak tersebut akan tetapi masyarakat lokal juga turut merasakan dampak dari adanya peningkatan infrastruktur tersebut.

Pelestarian Budaya

Dari sisi sosial-budaya, kegiatan wisata juga mendorong pelestarian budaya lokal. Masyarakat terdorong untuk menampilkan atraksi kesenian, kuliner tradisional, serta berbagai bentuk kearifan lokal yang menjadi identitas daerah. Tradisi dan budaya yang semula mulai terpinggirkan kini kembali dihidupkan sebagai bagian dari daya tarik wisata. Kegiatan ini bukan hanya mengenalkan budaya kepada wisatawan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap warisan budayanya sendiri. Salah satu wujud pelestarian tradisi dan

budaya yang diadakan di Wisata Bukit Klangon adalah kegiatan upacara Adat Merti Umbul Bebung. Upacara tersebut



Gambar 2
Upacara Adat Merti Umbul Bebung
(Sumber: Data Sekunder, 2024)

Merupakan salah satu upacara adat yang dilakukan untuk mengelola serta memelihara mata air yang berada di Padukuhan Kalitengah Lor. Wisata Bukit Klangon digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara tradisi tersebut dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat turut serta untuk melestarikan budaya. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut pengelola bekerja sama dengan masyarakat umum turut andil seperti menyediakan makanan dalam jumlah skala yang besar yang ada.

Lebih jauh lagi, keterlibatan bersama dalam pengelolaan wisata telah memperkuat solidaritas sosial antarwarga. Kolaborasi dalam merancang program, menjaga lingkungan wisata, serta berbagi tugas dan tanggung jawab menciptakan ikatan sosial yang lebih erat. Rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan wisata mendorong masyarakat untuk saling mendukung dan bekerja sama, sehingga tercipta kohesi sosial yang lebih kuat. Alvionita dkk (2025) yang menegaskan bahwa peran serta masyarakat dari pengelolaan kawasan wisata dapat memperkuat kohesi sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Partisipasi Masyarakat Dukuh Kalitengah Lor dalam Pengelolaan Wisata Bukit Klangon dapat dilihat dalam beberapa aspek partisipasi. Partisipasi pengambilan keputusan dapat dilihat dari ide serta gagasan dari masyarakat dalam pengembangan wisata. Partisipasi pelaksanaan dapat dilihat dari kontribusi masyarakat menjadi pengelola serta pelaku usaha. Partisipasi kebermanfaatan hasil dapat dilihat dengan adanya pembagian hasil yang merata. Partisipasi Evaluasi serta monitoring dapat dilihat dari adanya musyawarah yang dilakukan rutin oleh pengelola. Masyarakat umum juga terlibat dalam pengelolaan wisata secara tidak langsung seperti menyediakan *homestay* serta membuka usaha seperti warung.

Adanya wisata Bukit Klangon dinilai mampu memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Hal tersebut ditunjukkan melalui adanya variasi pekerjaan baru yang dilakukan oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai upaya

pelestarian budaya setempat yang dibuktikan dengan adanya penyelenggaraan seni dan tradisi di kawasan wisata tersebut. Tidak hanya itu pengelolaan Wisata Bukit Klangon oleh masyarakat juga berdampak pada penguatan kohesi sosial ditengah masyarakat. Partisipasi masyarakat tersendiri memiliki kelebihan yang paling signifikan diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Di sisi lain perlu adanya pengembangan yang menyeluruh serta keterlibatan berbagai stakeholder untuk terus mengembangkan potensi wisata. Komunikasi antar berbagai pihak serta konsistensi sangat diperlukan agar Wisata Bukit Klangon tetap Lestari.

REFERENSI

- Alvionita, M., Syafrini, D., Nainggolan, D. S., Qolbuna, M., Permata, B. D., & Fahmi, K. (2025). Implementasi Kelestarian Lingkungan: Mewujudkan Solidaritas Sosial yang Harmonis di Kawasan Wisata Pantai Padang. *Social Empirical*, 2(1), 110-118. <https://doi.org/10.24036/scemp.v2i1.63>.
- BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (2024). Perkembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Desember 2024. Perkembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Desember 2024 - Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta.
- Cáceres-Feria, R., Hernández-Ramírez, M., & Ruiz-Ballesteros, E. (2021). Depopulation, community-based tourism, and community resilience in southwest Spain. *Journal of Rural Studies*, 88, 108-116. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.10.008>.
- Fauzia, B. I. R., & Arieffiani, D. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Kota Surabaya). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 51-60. <https://doi.org/10.30649/aamama.v23i2.121>.
- Fifiyanti, D., Taufiq, M. L., & Ermawati, K. C. (2023). Penerapan Konsep Community Based Tourism Dalam Pengembangan Desa Wisata Burai. *Jurnal Industri Pariwisata*, 5(2), 201-208. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v5i2.1425>.
- Fitra, M. A., Asrinaldi, A., & Rusta, A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Revitalisasi Pasar Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(5), 1555-1568. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.34724>.
- Fitriani, E., Selinaswati, S., & Mardhiah, D. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekowisata Sungai Pinang. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 83-95. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i2.17>.
- Hadi, W., & Yulianto, A. (2021). Menggali potensi wisata alam untuk kegiatan sport tourism di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12(2), 142-150. <https://doi.org/10.31294/khi.v12i2.11053>.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Nurhayati, N., & Antoro, A. F. (2024). MENGURAI RUPA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA PAYA BENUA, NEGERI LASKAR PELANGI. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 61-71. <https://dx.doi.org/10.25157/dak.v11i1.12821>.

- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/1091/Perda%20Sleman%20No.%2011%20Tahun%202015%20ttg%20Rencana%20Induk%20Pembangunan%20Kepariwisata%20Daerah%20Tahun%202015-2025.pdf>.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.
- Ridwan, M., & Aini, W. (2020). *Perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata*. Deepublish.
- Rifdah, B. N., & Giriwati, N. S. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Keberlanjutan Kampung Budaya Polowijen, Malang. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(3), 139-148. <https://doi.org/10.32315/jlbi.v13i3.383>.
- Rocca, L. H. D., & Zielinski, S. (2022). Community-based tourism, social capital, and governance of post-conflict rural tourism destinations: the case of Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Tourism management perspectives*, 43, 100985. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100985>.
- Ruiz-Ballesteros, E., & González-Portillo, A. (2024). Limiting rural tourism: Local agency and community-based tourism in Andalusia (Spain). *Tourism Management*, 104, 104938. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2024.104938>.
- Septiani, A. N., & Maruf, M. F. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata (Studi di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). *Publika*, 7(7). <https://doi.org/10.26740/publika.v7n7.p%25p>.
- Shrestha, R. K., Decosta, J. P. L. E., & Whitford, M. (2025). Reimagining community-based indigenous tourism: Insights from the traditional knowledge of indigenous Newars of Nepal. *Tourism Management*, 108, 105110. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2024.105110>.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Syarifah, R., & Rochani, A. (2022). Studi literatur: Pengembangan desa wisata melalui Community Based Tourism untuk kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 109-129. <http://dx.doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19983>.
- Syarifuddin, D. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat. *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 141-157. Doi : 10.53682/jpjsre.v4i2.8024
- Tilar, R. D., & Alwin, A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Kawung Tilu Di Desa Cipayung Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 9(2). <https://dx.doi.org/10.20527/jpg.v9i2.13996>.